



SOEDIRMAN-OERIP: DWITUNGGAL PIMPINAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 1945-1948

Lucky Rohadi Nurohman¹, Ismi Novianti²

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta¹, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²
luckyrohadi@gmail.com¹, isminoviantii@gmail.com²

Accepted: 26 Januari 2023

Published: 28 Januari 2023

Abstract

This study aims to examine the concept of Dwitunggal which in terminology is defined as a very close and strong pair between two figures, in this case, Soedirman and Oerip Soemohardjo as the first supreme leaders of the Indonesian National Armed Forces in 1945-1948. The research method used in this research is library research. Data and information collection is carried out through books, scientific journals, and other research results that are worthy of being used as sources for research and have been critically and in-depth analyzed so that they can be used to support ideas in research. The findings obtained in this study are that differences in background are not always a barrier in building good relationships to achieve a goal, as seen in the story of Dwitunggal Soedirman-Oerip. It is known that Soedirman and Oerip had different backgrounds, namely Soedirman came from PETA while Oerip came from the KNIL, which at that time was considered a Dutch colonial army. Even so, the two can still work together and complement each other. Soedirman handled military politics while Oerip handled military techniques. This shows that Soedirman and Oerip did not see differences in one another's backgrounds as a barrier, but instead as a strength in building good relations to achieve common goals.

Key words: *Dwitunggal, Soedirman, Oerip Soemohardjo, Indonesian National Armed Forces.*

How to Cite: Nurohman. L. R., Novianti. I. (2023). Soedirman-Oerip: Dwitunggal Pimpinan Tentara Nasional Indonesia Tahun 1945-1948. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (148-154)

*Corresponding author:
luckyrohadi@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

INTRODUCTION

Angkatan perang merupakan suatu pondasi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa. Keberadaannya sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Secara harfiah, Angkatan Perang adalah satuan dan organisasi pertahanan maupun penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari suatu negara yang umumnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, yaitu penangkal segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata lain baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Suherman, 2009, p. 8). Di negeri kita Indonesia, Angkatan Perang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia yang disingkat menjadi TNI.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia sama sekali tidak mempunyai Angkatan perang. Keamanan dan pertahanan bangsa saat itu diserahkan kepada Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diresmikan pada keesokan harinya 23 Agustus 1945. BKR sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) hanya bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum (Djaja, 2018, p. 21).

Sebetulnya pada rapat 19 Agustus 1945 telah diputuskan untuk membentuk kesatuan tentara kebangsaan. Akan tetapi, dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 timbul suatu pendapat bahwa jika dibentuk tentara kebangsaan maka akan mengundang pertempuran, yaitu serangan dari Sekutu dan Jepang yang saat itu telah sepakat untuk mempertahankan *status quo*. Sementara itu, kekuatan kesatuan tentara yang akan dibentuk belum cukup untuk mengatasi serangan yang akan datang dari pihak Sekutu dan Jepang (Nugrahanto & Adyawardhina, 2018, p. 79). Oleh sebab itu terjadi perubahan terhadap keputusan untuk membentuk dan membangun kesatuan tentara kebangsaan menjadi pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang kemudian disebut BKR. Pembentukan BKR ini diharapkan dapat menghilangkan minat Sekutu dan Jepang untuk mengobarkan pertempuran.

Pada 5 Oktober 1945, BKR resmi diubah menjadi TKR melalui maklumat pemerintah Indonesia yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, p. 181). TKR kemudian berganti nama sebanyak tiga kali. *Pertama*, Tentara Keselamatan Rakyat

pada 7 Januari 1946. *Kedua*, Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 24 Januari 1946. *Ketiga*, Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947 (Matanasi, 2011, pp. 116-117).

Sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentu tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi ketentaraan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda (*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger*) maupun Pendudukan Jepang (Pembela Tanah Air). Organisasi-organisasi tersebut telah melahirkan bibit-bibit militer di Indonesia yang kemudian menjadi aktor utama dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebut saja Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Soedirman dan Oerip Soemohardjo sebagai Pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang pertama tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TNI yang pertama berlatar belakang PETA (Pembela Tanah Air). Sementara itu, Oerip Soemohardjo yang menjadi Kepala Staf Umum TNI yang pertama berasal dari KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger*). Sebagaimana Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam memimpin negara, perbedaan latar belakang Soedirman dan Oerip tidak menjadi halangan dalam membangun hubungan yang baik maupun bekerja sama. Keduanya dikenal saling menghormati dan saling melengkapi dalam usaha menyempurnakan pembentukan Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian ini akan menelaah lebih lanjut mengenai konsep Dwitunggal yang secara terminologi diartikan sebagai pasangan yang sangat erat dan kokoh antara dua tokoh dalam hal ini adalah Soedirman dan Oerip Soemohardjo selaku pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang pertama pada tahun 1945-1948. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimana proses lahirnya Dwitunggal Soedirman-Oerip dalam Kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia? (2) Bagaimana Peran Soedirman dan Oerip Soemohardjo dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia? (3) Makna apa yang dapat kita ambil dari kisah Dwitunggal Soedirman-Oerip untuk kehidupan sehari-hari?

METHODOLOGY

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019, p. 2). Terdapat berbagai jenis metode penelitian yang bisa digunakan dalam bidang ilmu sosial. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed, metode penelitian kepustakaan yang disebut juga dengan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017, p. 3). Secara sederhana, Metode penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun data dan informasi yang dihimpun tersebut berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang layak dijadikan sumber untuk penelitian dan telah dianalisis secara kritis serta mendalam sehingga dapat digunakan untuk mendukung gagasan dalam penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini memiliki empat tahapan, antara lain: (1) Menyiapkan Alat Perlengkapan. (2) Menyusun Bibliografi Kerja. (3) Mengatur Waktu. (4) Membaca dan Membuat Catatan Penelitian (Zed, 2017, pp. 16–23).

DISCUSSION

1. Dwitunggal Pimpinan Tentara Nasional Indonesia

Soedirman dan Oerip Soemohardjo adalah pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Soedirman menjadi orang nomor satu dalam pucuk pimpinan TNI sebagai Panglima Besar. Sementara Oerip Soemohardjo sebagai orang nomor dua dengan jabatan Kepala Staf Umum. Keduanya sangat berjasa dalam membentuk, membangun, dan menyempurnakan Angkatan perang Indonesia khususnya di masa Revolusi Nasional. Dalam sejarah pimpinan Tentara Nasional Indonesia, keduanya dikenal sebagai Dwitunggal.

Pimpinan dalam organisasi atau lembaga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan tujuan organisasi, memimpin dan mengkoordinasi kegiatan, serta memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Djadjuli, pimpinan dapat dimaknai juga sebagai “Kumpulan para pemimpin” (Djadjuli, 2017, p. 567). Dalam konteks kepemimpinan nasional, kita mengenal istilah Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai pimpinan bangsa Indonesia.

Dalam penelusuran sejarah, istilah Dwitunggal dapat ditemui sejak awal kemerdekaan. Kala itu dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) pada 18 Agustus 1945 Soekardjo Wirjopranoto mengusulkan jika Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu Dwitunggal (Hatta, 2011, pp. 98-99). Soekardjo Wirjopranoto sendiri dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang aktif dalam organisasi Boedi Oetomo yang kemudian menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.

Sementara itu, Menurut Soediro, mantan Gubernur Jakarta tahun 1950-an, istilah Dwitunggal Soekarno-Hatta mulai dipopulerkan oleh dirinya dan Soepeno (Menteri Pembangunan dan Pemuda Indonesia ke-2) saat menjelang Proklamasi (Tugiyono, Kutoyo, & Evy, 2000, p. 144). Secara konsep, Dwitunggal pada dasarnya adalah tentang memanfaatkan potensi yang ada dalam perbedaan yang kita miliki, dengan memadukan kemampuan dan sumber daya yang berbeda, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis secara jasmani dan rohani (Yudha, 2006, p. 3).

Proses awal dari lahirnya Dwitunggal Pimpinan Tentara Nasional Indonesia ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang saat itu disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Selanjutnya, diputuskan untuk mengangkat Soeprijadi seorang anggota PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar sebagai Menteri Keamanan Rakyat sekaligus sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Moehamad Soeljoedikoesoemo, mantan daidanco Peta diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum (Nugrahanto & Adyawardhina, 2018, p. 80).

Akan tetapi, timbul masalah di kalangan tentara saat itu. Soeprijadi sebagai Panglima terpilih tidak pernah hadir, datang, dan menunjukkan keberadaannya di Jakarta atau di daerah lain. Hal tersebut kemudian melahirkan desas-desus bahwa ia sudah gugur setelah pemberontakan yang dipimpinnya di Blitar mengalami kegagalan (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, p. 181). Oerip Soemohardjo kemudian membentuk Markas Tertinggi TKR yang berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 12 November 1945 Oerip memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk sebuah rapat besar. Rapat yang dilaksanakan di Markas Tertinggi TKR, Yogyakarta itu kemudian melahirkan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu pemilihan Panglima Tentara Keamanan Rakyat Pertama.

Pemilihan dilakukan secara langsung dan

demokratis melalui pemungutan suara. Terdapat delapan nama calon Panglima TKR, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Sultan Yogyakarta), Widjoyo Soejokoesomo, GPH Poerbonegoro (Bangsawan Jawa), Oerip Soemohardjo (Mantan Perwira KNIL yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Umum TKR), Soedirman (Mantan PETA yang kemudian menjabat sebagai Komandan Resimen TKR Banyumas), Soejadharma (Mantan Perwira Angkatan Udara KNIL), Pardi (Laksamana TKR Laut), dan Nazir.

Pemungutan suara berlangsung sebanyak tiga kali. Pada sesi pertama, dua calon gugur. Berikutnya, dua calon gugur lagi. Barulah pada pemilihan ketiga tersisa empat nama, yaitu Soedirman, Oerip Soemohardjo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Soejadharma. Selanjutnya, Hasil pemungutan suara menunjukkan Soedirman unggul tipis terhadap Oerip Soemohardjo. Soedirman meraih 22 suara sementara Oerip 21 suara (Tim Historia, 2019, p. 90). Hal tersebut membuat Soedirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1945 Presiden Soekarno resmi melantik Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sementara itu, Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, p. 181). Setelah pelantikan, Soedirman dan Oerip segera bekerja sama untuk menyempurnakan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (Tim Historia, 2019, p. 101).

2. Jenderal Soedirman dalam Mempersatukan Tentara

Sebagai seorang Panglima Besar tentu Jenderal Soedirman mengemban tugas yang sangat berat. Setelah resmi dilantik pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman harus mempersatukan seluruh elemen pejuang baik itu eks-KNIL, eks-PETA maupun organisasi bersenjata di luar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) misalnya laskar-laskar dari barisan rakyat. Soedirman bersama rekannya Oerip Soemohardjo menyadari bahwa perjuangan yang kuat menghendaki dipersatukannya seluruh kemampuan baik itu tenaga dan materi. Jika masing-masing pihak fokus bertindak sendiri tanpa mengingat kedudukan dan wewenang pucuk pimpinan maka sangat riskan sekali terhadap nafas perjuangan bangsa. Kita akan mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin

memutuskan semangat perjuangan bangsa Indonesia.

Soedirman juga berpandangan bahwa tentara tidak hanya merupakan alat teknis militer saja, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ideologi negara, yaitu Pancasila (Soekamto, 2011, p. 94). Oleh sebab itu, Soedirman sangat menginginkan persatuan di tubuh Tentara Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Proses awal dari perjalanan panjang penyatuan organisasi bersenjata, yaitu ketika dikeluarkan Maklumat Markas Besar Umum TKR pada 30 Oktober 1945 mengenai laskar rakyat sebagai penolong dan pembantu Tentara Keamanan Rakyat (Soekamto, 2011, p. 92). Maklumat tersebut memuat keterkaitan antara TKR dengan Laskar Rakyat. Inti dari isi Maklumat tersebut adalah bahwa Tentara Keamanan rakyat pada masa itu belum sempurna baik dalam hal persenjataan maupun personil sehingga dibutuhkan organisasi bersenjata di luar tentara sebagai penolong dan pembantu Tentara Keamanan Rakyat.

Pimpinan sipil dalam hal ini Soekarno menyadari bahwa persatuan harus ada dalam setiap unsur bangsa Indonesia termasuk tentara. Pada tanggal 24 Januari 1946, Soekarno mengeluarkan dekrit bahwa nama tentara harus diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan nama itu merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa TRI merupakan satu-satunya organisasi bersenjata yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soekamto, 2011, p. 98).

Perubahan nama TKR menjadi TRI tentunya memberikan motivasi dan penyatuan dalam tubuh tentara Indonesia sebagai semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Soedirman, TRI adalah tentara nasional dan tentara rakyat yang percaya kepada kekuatan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari luar negeri (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, p. 181). Akan tetapi, perubahan nama itu tidak menegaskan dan tidak menentukan bagaimana status dan kedudukan organisasi bersenjata di luar TRI seperti laskar-laskar perjuangan dari barisan rakyat (Midaanzasari, 2011, p. 60). Untuk menyempurnakan koordinasi antara pucuk Pimpinan Tentara dengan para Laskar Rakyat, Panglima Besar TRI Jenderal Soedirman mengangkat 7 orang tokoh kelaskaran untuk duduk dalam Dewan Penasihat Pucuk Pimpinan Tentara. Di antara mereka terdapat nama Sayuti Melik dari Dewan Perjuangan Jawa Tengah,

Tirwan dari Dewan Perjuangan Jawa Barat, dan Sutomo dari Pusat BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) (Soekamto, 2011, p. 100).

Pada kenyataannya masih terdapat laskar rakyat yang keberatan untuk dilebur ke dalam Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Mei 1946, Panglima Soedirman mengeluarkan pernyataan untuk menekankan persatuan dalam menghadapi keadaan yang semakin genting (Soekamto, 2011, p. 106). Presiden Soekarno kemudian membentuk panitia yang dipimpin oleh Presiden sendiri dan salah seorang wakilnya, yaitu Jenderal Soedirman. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 resmi ditetapkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang merupakan gabungan antara TRI dan Laskar Bersenjata (Midaanzasari, 2011, p. 60).

Terpilihnya Soedirman sebagai Panglima Besar merupakan awal dari perkembangan organisasi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Panglima Besar Jenderal Soedirman telah meletakkan dasar yang sangat kuat dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Ia berhasil mempersatukan semua elemen bersenjata ke dalam satu wadah sehingga tercipta kekuatan militer yang tangguh untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa.

3. Oerip Soemohardjo dalam Pembentukan Akademi Militer

Oerip Soemohardjo memiliki peran penting dalam membentuk, membangun, dan menyempurnakan Tentara Nasional Indonesia. Sebagai salah satu pribumi dengan pangkat tertinggi dalam kesatuan KNIL, yakni berpangkat Mayor tentunya Oerip memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas dalam bidang militer. Salah satu upaya Oerip dalam membentuk, membangun, dan menyempurnakan Tentara Nasional Indonesia adalah dengan memprakarsai pembentukan akademi militer agar tercipta tentara Indonesia yang tangguh dan profesional. Secara khusus, tujuan akademi militer itu adalah untuk memberikan pendidikan militer dalam waktu yang cukup singkat, di mana sekurang-kurangnya akan diberikan pengetahuan dasar mengenai praktik kemiliteran (Britton, 1996, p. 59). Pengumuman pembukaan akademi militer dan sekolah kader kemudian dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Oerip Soemohardjo, selaku Kepala Markas Besar Umum TKR (Kuswono, 2016, p. 91). Akademi militer itu kemudian dibentuk di daerah

Yogyakarta dengan Mayor Jenderal Soewardi sebagai pimpinannya.

Pembentukan akademi militer ini umumnya didasari oleh pandangan Oerip dan mantan perwira KNIL lainnya yang memiliki tujuan untuk menanamkan profesionalisme dalam tentara sehingga tercipta tentara yang benar-benar berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oerip sendiri memiliki ketakutan dengan keberadaan laskar yang diluar kendali tentara serta tidak memiliki disiplin, latihan, dan pengalaman militer yang cukup. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk pada perkembangan terbentuknya tentara reguler yang profesional (Matanasi, 2011, p. 145).

Oerip dan mantan perwira KNIL pada umumnya mendefinisikan tentara profesional sebagai tentara yang tidak mencampuri urusan sipil sekaligus menghindari dunia politik. Tugas tentara hanya bertempur di medan pertempuran melawan penjajah maupun pemberontak. Setelah pertempuran berhasil dimenangkan, maka tentara akan kembali ke barak dengan tenang.

Pembukaan dan pendaftaran calon taruna akademi militer kemudian diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) serta berbagai surat kabar seperti harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada 1 November 1945 dan koran Merdeka pada 2 November 1945. Pendaftaran calon taruna akademi itu dibatasi paling lambat sampai tanggal 7 November 1945. Adapun kriteria calon taruna meliputi, anak laki-laki umur 18 sampai 20 tahun, sehat jasmani dan rohani, mempunyai tekad yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan untuk sekolah kader harus tamatan sekolah rakyat kelas 6 atau sederajat (Kuswono, 2016, p. 91).

Kelahiran Akademi militer di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Oerip Soemohardjo kemudian menjadi awal dari terciptanya tentara profesional. Akademi militer adalah langkah penting dalam menjadikan TKR sebagai tentara profesional yang tidak mencampuri urusan sipil dan berfokus untuk menjaga serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

CONCLUSION

Sebagai seorang pemimpin, Soedirman dan Oerip saling berbagi peran dan melengkapi kekurangan masing-masing. Soedirman mengatasi politik militer sedangkan Oerip menangani teknis militer. Perbedaan latar belakang keduanya tidak menjadi halangan dalam membina hubungan yang baik. Sebelumnya,

diketahui bahwa terkadang terjadi konflik dalam tubuh TNI terkait perbedaan latar belakang. Mereka yang merupakan mantan anggota KNIL termasuk Oerip Soemohardjo sering kali mendapatkan prasangka buruk sebagai mata-mata Belanda (Matanasi, 2011, p. 139). Soedirman sendiri tidak pernah mempermasalahkan *background* para mantan KNIL yang dianggap sebagai tentara kolonial Belanda (Matanasi, 2011, p. 141). Bahkan, Soedirman pun mengakui bahwa Oerip merupakan sosok yang lebih berpengalaman dibanding dirinya. Soedirman sangat menghormati Oerip karena pengalaman, keahlian, dan umurnya yang lebih tua (Tim Historia, 2019, p. 104). Oleh sebab itu, Soedirman memercayakan penataan organisasi tentara kepada Oerip (Tim Historia, 2019, p. 101).

Sementara itu, Oerip Soemohardjo sebagai mantan KNIL yang bisa dikatakan sebagai salah satu pribumi dengan pangkat tertinggi dalam kesatuan tersebut legowo dan berbesar hati menerima kepemimpinan Soedirman. Oerip menyadari dan menghormati Soedirman karena pengalaman kemasyarakatannya yang diperlukan dalam masa itu (Tim Historia, 2019, p. 104). Diketahui, pada masa awal kemerdekaan sebagian besar tentara kita adalah mantan anggota PETA termasuk Soedirman.

Sekiranya dari kisah Dwitunggal Soedirman-Oerip dalam Kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia kita dapat mengambil beberapa makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai berikut. *Pertama*, perbedaan latar belakang tidak selalu menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Diketahui, Soedirman dan Oerip memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu Soedirman berasal dari PETA sedangkan Oerip berasal dari KNIL, yang pada masa itu dianggap sebagai tentara kolonial Belanda. Meskipun demikian, keduanya tetap bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Soedirman mengatasi politik militer sedangkan Oerip menangani teknis militer. Soedirman bahkan mengakui bahwa Oerip lebih berpengalaman dibanding dirinya dan memercayakan penataan organisasi tentara kepada Oerip.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Soedirman dan Oerip saling menghargai, mengakui kelebihan dan kekurangan, serta saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Soedirman dan Oerip tidak

memandang perbedaan latar belakang satu sama lain sebagai penghalang, tetapi justru sebagai kekuatan dalam membangun hubungan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan latar belakang seringkali muncul di dalam tim atau organisasi. Akan tetapi, jika kita bisa menghargai keberagaman tersebut dan terbuka untuk memahami perspektif orang lain, maka perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Kedua, Sikap rendah hati terhadap keputusan demokratis sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kesatuan suatu organisasi. Diketahui, Hasil pemungutan suara menunjukkan Soedirman unggul tipis terhadap Oerip Soemohardjo. Soedirman meraih 22 suara sementara Oerip 21 suara. Soedirman pun terpilih menjadi panglima Tentara Keamanan Rakyat yang pertama. Disisi lain kita mengetahui bahwa Oerip lebih senior dan berpengalaman dalam bidang militer dibandingkan dengan siapapun ketika itu termasuk Soedirman sendiri. Akan tetapi, Oerip Soemohardjo yang bisa dikatakan sebagai salah satu pribumi dengan pangkat tertinggi dalam kesatuan KNIL tersebut legowo dan berbesar hati menerima kepemimpinan Soedirman. Oerip bahkan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Soedirman dengan tetap berkontribusi penuh dan bekerja sama dalam upaya menyempurnakan organisasi Tentara Keamanan Rakyat. Hal di atas dapat menjadi contoh tentang bagaimana sikap yang baik, seperti legowo dan berbesar hati, dapat memengaruhi sebuah situasi yang mungkin bisa menjadi sumber konflik atau ketidaksepahaman.

Ketiga, dari kisah di atas, kita juga dapat mengambil makna bahwa sikap dan tindakan yang mengutamakan kepentingan organisasi dan kebersamaan di atas kepentingan pribadi adalah hal yang penting dalam suatu organisasi, terlepas dari konteks politik atau tidak. Meskipun Oerip Soemohardjo kalah dalam pemilihan panglima TKR dan bisa saja merasa tidak puas atau kecewa, ia tetap mengutamakan kepentingan organisasi dan bersedia bekerja sama dengan pemimpin yang terpilih untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya hal ini dapat menjadi contoh yang baik khususnya bagi para politikus di Indonesia maupun di negara lainnya. Diketahui, dalam politik terkadang persaingan antar kandidat atau partai dapat memunculkan ketegangan dan konflik yang berpotensi mengancam stabilitas organisasi atau negara.

REFERENCES

- Djadjuli, D. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565–573.
- Kuswono. (2016). Pembentukan Akademi Militer Yogyakarta 1945-1950. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 12(1), 88–99.
- Nugrahanto, W., & Adyawardhina, R. (2018). DEMOKRASI DALAM SEJARAH MILITER INDONESIA: Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Pada 1945. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(1), 78–85.
- Yudha, I. M. B. (2006). Dwitunggal dalam Dimensi Lontar: Dualisme dalam Penciptaan Seni Lukis. *Imaji: JURNAL SENI DAN PENDIDIKAN SENI*, 4(1), 1–19.
- Britton, P. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia: Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat* (Tim Redaksi LP3ES, Trans.). Jakarta: LP3ES.
- Djaja, W. (2018). *TNI Masa Revolusi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Hatta, M. (2011). *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Matanasi, P. (2011). *SEJARAH TENTARA: Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekamto, R. E. (2011). *Panglima Besar Tidak Pernah Sakit (Biografi Pangsar Jenderal Besar Soedirman)*. Yogyakarta: Narasi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, C. (2009). *Bangga Menjadi Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka.
- Tim Historia. (2019). *Oerip Soemohardjo Bapak Tentara Yang Dilupakan*. Jakarta: Kompas.
- Tugiyono, Kutoyo, S., & Evy, R. (2000). *Dwitunggal Soekarno-Hatta Pahlawan Proklamator Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Midaanazar. (2011). *Peranan Jenderal Soedirman Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949* (Undergraduate Thesis). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.